

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari ulasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum positif bahwa Presiden berhak menerima dan menolak pengajuan grasi terhadap narapidana yang telah memperoleh putusan tetap dari pengadilan dalam semua tingkatan dengan kualifikasi hukuman mati, seumur hidup, dan pidana serendah-rendahnya dua tahun penjara sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 05 tahun 2010 juncto undangundang nomor 22 tahun 2002 tentang grasi, salah satunya grasi yang diberikan kepada pidana mati kasus narkoba, presiden harus mempertimbangkan dengan bijak dan teliti tentang dampak negatifnya, yaitu dampak pengedaran narkoba yang dapat merusak masyarakat dan stabilitas keamanan negara. Pidana mati merupakan hukuman tepat bagi bandar dan pengedar narkoba, agar mendapat efek jera setiap perbuatannya.
2. Hukum Islam tidak melarang pemaafan hukuman atau Grasi oleh pemerintah. Grasi diperbolehkan dalam batas-batas yang sangat sempit dan demi mempertimbangkan kemaslahatan umat dan mewujudkan keadilan hakiki. Didalam al-Quran dan sunnah Nabi tidak diperincikan sanksi hukum bagi penyalahgunaan narkoba adalah hukuman ta'zir , maka penerapan hukuman ta'zir tergantung dari besar ringannya suatu

perbuatan. Pengambilan hukuman ta'zir kepada pidana berat dilakukan proses pengadilan, yaitu hukuman mendidik yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kejahatan yang belum ditentukan hukumanya oleh syari'at.

## B. Saran

Perlu adanya regulasi dan pengawasan yang tegas dalam memuat Pasal dan ayat yang ada dalam Undang-Undang grasi saat ini yang berlaku, terutama mengenai kewenangan Presiden yang begitu besar dalam pemberian grasi yang dalam Undang-undang grasi tanpa pencantuman jenis tindak pidana apa saja yang bisa mengajukan grasi, sekalipun dengan adanya kategori hukuman yang telah mengindikasikan pidana berat. Dan juga tentang dasar pertimbangan Presiden dalam pemberian grasi yang tidak di cantumkan secara eksplisit. Dengan demikian diharapkan tidak ada celah hukum dengan alasan pembenaran untuk pemberian grasi terhadap kasus-kasus yang menjadi sorotan dan kemaslahatan public. Selanjutnya yang terpenting adalah konsistensi dalam penerapan hukum oleh Negara, supaya tidak saling bertentangan antara Undang-Undang satu dengan Peraturan yang lainnya dan agar terwujudnya kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.